

**PENDEKATAN *MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIP*
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI NUSA TENGGARA TIMUR:
SINTESIS KAJIAN *SCOPUS-BASED SYSTEMATIC
LITERATURE REVIEW***

**¹ Nur Alifah, ² Indah Ayu Permana Pribadi, ³ Imam Radianto A.S.P,
⁴Chamid Sutikno, ⁵Ariesta Amanda**

Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset Inovasi Nasional

¹ismianaalifah@gmail.com, ²indahayupermanap@gmail.com,
³imamradianto@gmail.com, ⁴sutiknochamid@gmail.com, ⁵ariestaamanda92@gmail.com

ABSTRAK

Stunting merupakan permasalahan publik yang bersifat multidimensional dan kompleks sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *multi-stakeholder partnership* dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui metode *Systematic Literature Review (SLR)*. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan basis data *Scopus* dan *Web of Science* dengan mengacu pada kerangka PRISMA, sehingga diperoleh 52 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola kebijakan publik. Implementasi kebijakan penurunan stunting masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat sistemik, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta dominasi peran pemerintah yang belum diimbangi dengan keterlibatan aktor non-pemerintah secara optimal. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan cenderung berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara substantif. Pendekatan *multi-stakeholder partnership* memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penguatan kolaborasi antar aktor. Namun, implementasinya di daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menghasilkan sinergi operasional. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi lintas aktor yang lebih substantif, peningkatan koordinasi antar sektor, serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi menjadi faktor kunci dalam mendorong efektivitas kebijakan penurunan stunting secara berkelanjutan.

Kata kunci: *stunting*, implementasi kebijakan, *multi-stakeholder partnership*, *systematic literature review*, Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

Stunting is a multidimensional and complex public issue that requires integrated and collaborative policy approaches. This study aims to analyze the implementation of a multi-stakeholder partnership approach in accelerating stunting reduction in East Nusa Tenggara Province using a Systematic Literature Review (SLR) method. The literature search was conducted systematically using Scopus and Web of Science databases based on the PRISMA framework, resulting in 52 articles that met the inclusion criteria. The findings indicate that stunting is not merely a health issue but is also closely related to social, economic, and public governance aspects. The implementation of stunting reduction policies still faces systemic challenges, including weak cross-sector coordination, limited resources, and the dominance of government actors without optimal involvement of non-government stakeholders. These conditions lead to fragmented implementation and limit substantive integration in practice. The multi-stakeholder partnership approach plays a strategic role in improving policy effectiveness through strengthening collaboration among actors. However, its implementation at the regional level, particularly in East Nusa Tenggara, remains largely formalistic and has not fully achieved operational synergy. Therefore, strengthening substantive cross-sector collaboration, improving coordination, and optimizing monitoring and evaluation systems are key factors in enhancing the effectiveness of sustainable stunting reduction policies.

Keywords: *stunting; policy implementation; multi-stakeholder partnership; systematic literature review; East Nusa Tenggara*